



Tersisih Jalur Domisili Radius, Terpaksa Pindah KK

Sambungan dari hal 1

Ketimpangan persebaran SMP negeri di Kota Jogja masih menjadi persoalan. Dari total 16 SMP negeri yang tersebar di kota ini, tidak ada satu pun yang berada di empat kemitraan di atas. Kondisi ini membuat banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anak mereka dalam proses sistem penerimaan murid baru (SPMB).

Salah satu jalur di SPMB yakni domisili radius, yang mengutamakan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan, jadi persoalan pelik bagi warga di empat kemitraan itu. Apalagi bagi warga di Kemitraan Mergangsan yang tinggal cukup jauh dari sekolah negeri terdekat, seringkali tidak lolos seleksi jalur domisili radius.

Salah satu orang tua siswa, Fitrija Malinda, warga Kelurahan Keparakan, Kemitraan Mergangsan mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri meski tinggal di wilayah Kota Jogja. Sebagai informasi, Fitrija sendiri mendaftarkan sang anak pada tahun lalu, di mana saat itu prosesnya masih bernama penerimaan peserta didik baru (PPDB).

"Sudah coba daftar ke tiga SMP negeri yang lokasinya paling dekat dari rumah, tapi semua penuh di jalur zonasi atau domisili itu," katanya kepada *Radar Jogja*, Sabtu (28/6).

Akibatnya, ia mau tidak mau akhirnya menyekolahkan sang anak ke SMP swasta. Secara garis besar, diakui biayanya memang lebih mahal. "Untuk biaya jelas lebih mahal. Tapi tidak ada pilihan lain," ujarnya. Sebagai orang tua, Fitrija ber-

harap agar ada perhatian serius dari pemerintah daerah terkait kondisi ini. Ia meminta setidaknya ada penambahan SMP negeri di wilayah-wilayah kosong seperti Mergangsan.

Selain itu, ia juga menginginkan adanya penyesuaian sistem domisili, agar lebih adil bagi warga kota yang tidak memiliki sekolah negeri di kecamatannya.

"Kalau zonasi atau domisilinya tetap pakai jarak, kami yang enggak punya sekolah negeri di wilayah pasti terus tersisih," ujarnya.

Sementara itu, penuturan lain datang dari warga Kelurahan Wirogunan (Kemitraan Mergangsan) Suhardi. Ia mengaku terpaksa memindahkan alamat anaknya ke rumah nenek di Kemitraan Danurejan sejak tahun lalu, agar bisa mendaftar ke SMP negeri di zona tersebut.

"Alamat KK anak ikut nenek yang tinggal di Danurejan. Cuma begitu bisa dapat jalur domisili. Kalau tidak, anak saya tidak masuk juga," ujarnya.

Langkah itu, menurut Suhardi, lebih realistis ketimbang memaksakan sang anak masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi. "Kalau *dek-deket* Wirogunan sini ya adanya swasta. Lebih mahal pasti," tandasnya.

Bisa Memanfaatkan Sekolah Terdekat

Sejumlah kemitraan di Kota Jogja belum memiliki sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP. Meskipun begitu, calon siswa tidak perlu bingung. Sebab, menurut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, calon siswa bisa tetap mendaftar

pada sekolah terdekat dengan tempat tinggal.

Kepala Disdikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori mengatakan, berdasarkan kebijakan yang berlaku, penentuan zonasi radius ditentukan oleh jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon siswa berdekatan dengan sekolah maka masih ada kemungkinan diterima.

Dia mengungkapkan, dari hasil pendataannya ada empat kemitraan di Kota Jogja yang tidak memiliki SMP Negeri. Yakni Kemitraan Mergangsan, Pakualaman, Wirobrajan, dan Ngampilan. Namun, menurutnya, selama ini siswa-siswi yang berasal dari empat kemitraan itu juga bisa diterima di sekolah negeri.

Budi pun mengambil contoh di Kemitraan Mergangsan, calon siswa dari wilayah itu bisa mendaftar sekolah di SMPN 10 Jogja yang berada di Kemitraan Umbulharjo. Kemudian untuk calon siswa dari Kemitraan Wirobrajan, memiliki potensi diterima di SMPN 11 Jogja dan SMPN 7 Jogja yang terletak di Kemitraan Tegalrejo.

"Karena acuannya tetap jarak rumah dari sekolah," ujar Budi kepada *Radar Jogja*, Jumat (27/6). Terkait sosialisasi kepada orang tua maupun calon siswa, dia mengklaim Disdikpora Kota Jogja juga sudah cukup masif memberikan pemahaman melalui sekolah. Selain itu, kebijakan radius atau zonasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) juga sudah lama diterapkan.

Sebagai informasi, pada SPMB tahun ini kuota jalur domisili radius sebesar 10 persen dari total kapasitas peserta didik 3.456 siswa di 16 SMP negeri di Kota Jogja. Selain itu, juga dibuka jalur domisili daerah yang bisa dimanfaatkan oleh calon siswa dari luar Kota Jogja dengan kuota 40 persen.

Kemudian juga disediakan kuota jalur afirmasi Keluarga Sasaran Laminan Perlindungan Sosial (KSJPS) kuota 15 persen, afirmasi disabilitas kuota 5 persen, mutasi dan kemaslahatan guru kuota 5 persen, prestasi akademik 10 persen, prestasi umum 10 persen, prestasi dan khusus kuota 5 persen.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Disdikpora Kota Jogja Mannarima menambahkan, untuk Kemitraan Umbulharjo juga disediakan jalur khusus domisili daerah. Kebijakan ini diambil karena jumlah calon siswa di kemitraan ini cukup besar namun hanya tersedia satu sekolah yakni di SMPN 10 Jogja.

Mannarima menjelaskan, disediakannya jalur khusus domisili daerah itu sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya masyarakat yang sulit mengakses jalur radius di Kemitraan Umbulharjo. Adapun tahap khusus di Umbulharjo dibuka 20 hingga 23 Juni 2025 lalu dengan kuota 20 persen.

"Kami berkomitmen agar ada pemerataan yang bisa masuk jalur radius. Kalau bersaing jalur radius, masyarakat Umbulharjo sulit. Makanya kami beri separo dari jalur domisili daerah khusus Umbulharjo di SMPN 10 Jogja," terang Mannarima. (Iza/Inu/Jaz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005